

**Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman
Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu
Pengembangan Ekonomi Di Indonesia.**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Yoris Defane

2002190050



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yoris Defane
NIM : 2002190050
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 Oktober 2022



Yoris Defane



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia.

Nama : Yoris Defane
NIM : 2002190050
Program Studi : Magister Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 21 Oktober 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA.

Pembimbing II

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

Kaprodi Magister Hukum

Dr. Ziwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Direktur Program Pasca Sarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadaek, M.Pd., PA.



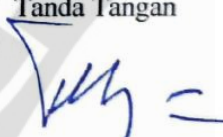
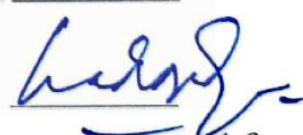

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 15 November 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yoris Defane
NIM : 2002190050
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia” oleh tim penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA.	_____	
2	Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H	_____	
3	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	_____	

Jakarta, 15 November 2022

Yoris Defane



Universitas Kristen Indonesia

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Nama : Yoris Defane
NIM : 2002190050
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan
Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan
Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 21 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

Yoris Defane

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul, Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan dan ketulusan hati, Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya Penulis boleh ada sampai saat ini.
2. Istriku, Grace, anakku Gavi dan Yesa, yang sangat Penulis cintai, yang selalu mendukung kegiatan Penulis.
3. Mama, Oma Yane, adik-adikku, Martchel dan Marthin yang selalu mendukung Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA., dan Bapak Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., yang dengan kebaikannya membimbing Penulis untuk menyusun tesis ini.
5. Teman-teman kuliah, seluruh Dosen program Studi Magister Hukum dan Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak Muhammad Iqbal Mandala Putra, Koordinator Bimbingan Usaha, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia diwawancarai guna penyusunan tesis ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Tesis ini. Tuhan memberkati.

Jakarta, 21 Oktober 2022

Yoris Defane

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.3.1 Maksud Penelitian	10
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	11
1.4.1 Tahapan Penelitian	12
1.4.2 Metode Analisis Data	13
1.4.3 Kajian Pustaka	13
1.5 Sistematika Penelitian	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Kerangka Teoritis dan Konsep	17
2.1.1 Kerangka Teoritis	17
2.1.1.1 Teori Sistem Hukum	17
2.1.1.2 Teori Kepastian Hukum	25
2.1.2 Kerangka Konsep	32
2.1.2.1 Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	32
2.1.2.2 Konsep Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	42
2.1.2.3 Konsep Perusahaan Memiliki Kewajiban untuk melaksanakan <i>Good Corporate Governance</i>	58
2.1.2.4 Peristilahan	65
BAB III HASIL PENELITIAN	69
1.1 Implementasi Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Khususnya Tentang Pengalihan Saham Dan Perubahan Direksi Dan/Atau Komisaris Pada Bidang Usaha Pertambangan	69
3.1.1 Uraian Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi	69
3.1.2 Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi	75
3.1.3 Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Pasca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi	84

BAB IV HASIL PENELITIAN 94

4.1 Upaya Harmonisasi Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman
Modal Khususnya Tentang Pengalihan Saham Dan Perubahan
Direksi Dan/Atau Komisaris Pada Bidang Usaha Pertambangan 94

BAB V PENUTUP 103

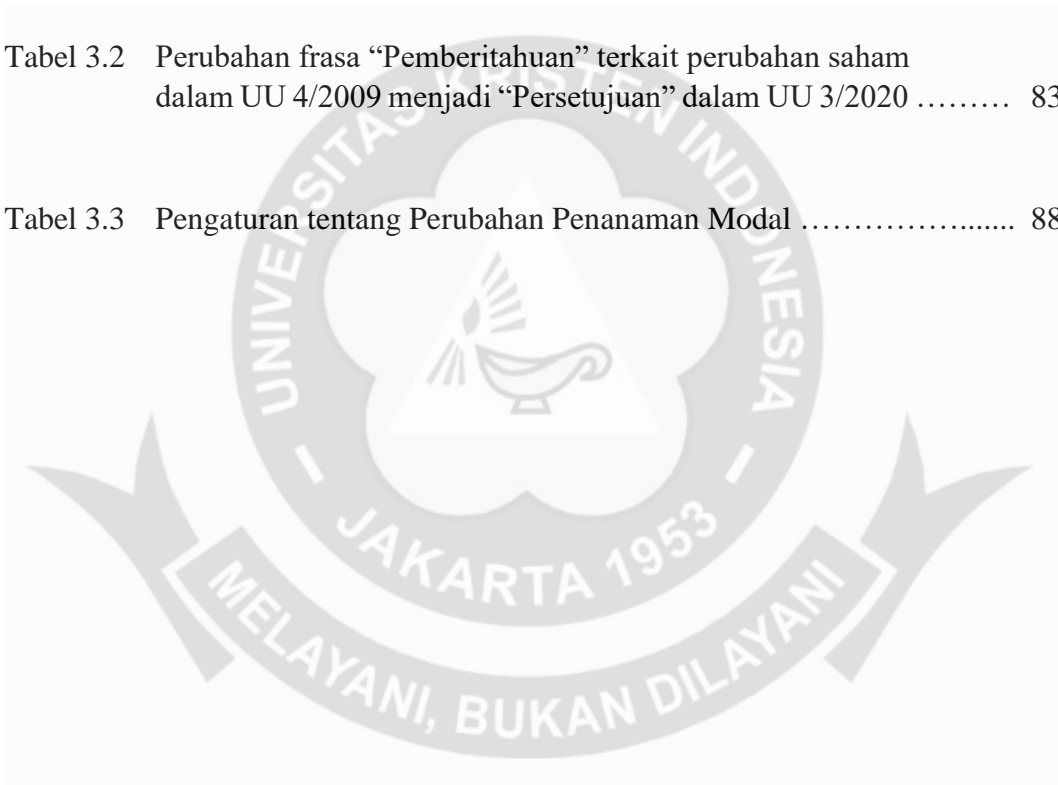
5.1 Kesimpulan 103
5.2 Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbandingan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) UU 4/2009 dengan Pasal 15 Permen ESDM 27/2013	82
Tabel 3.2	Perubahan frasa “Pemberitahuan” terkait perubahan saham dalam UU 4/2009 menjadi “Persetujuan” dalam UU 3/2020	83
Tabel 3.3	Pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal	88



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia. Perumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan? Bagaimana upaya melakukan harmonisasi Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan? Penelitian ini menggunakan bentuk dan pendekatan yuridis normative dan didukung dengan penelitian empiris berupa wawancara, dan jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder dengan cara perolehan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan, Pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. Diatur dalam Pasal 15 Permen ESDM 27/2013. Selanjutnya, Pasca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. terdapat tiga kali revisi atas pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal, yakni melalui Permen ESDM 34/2017, Permen ESDM 11/2018, dan Permen ESDM 7/2020. Dalam perubahan ketentuan-ketentuan tersebut, sehubungan dengan pengalihan saham tetap wajib membutuhkan persetujuan Menteri ESDM sebelum diajukan kepada Menkumham. Namun terkait dengan perubahan direksi/komisaris maka cukup memberitahukan kepada Menteri ESDM paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Kemudian, dalam implementasi pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal belum terdapat sinkronisasi antara Kemenkumham (Ditjen AHU) dengan Kementerian ESDM. Hal ini dapat terlihat dari Permenkumham 21/2021 yang tidak mencantumkan persetujuan Menteri ESDM sebelum diajukan kepada Kemenkumham, apabila perseroan dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara melakukan pengalihan saham. Hal ini mengakibatkan pengesahan terhadap pengalihan saham perseroan dalam bidang usaha pertambangan, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.

Kata Kunci: Pertambangan Mineral dan Batubara, Perubahan Penanaman Modal, Pengalihan Saham dan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris.

ABSTRACT

This study examines the harmonization of regulations concerning changes in investment in the mining sector as one of the economic developments in Indonesia. The formulation of the problem in this study is How is the implementation of the regulation regarding Investment Changes, especially regarding the transfer of shares and changes to the directors and/or commissioners in the mining business sector? What are the efforts to harmonize Investment Changes, especially regarding the transfer of shares and changes to directors and/or commissioners in the mining business sector? This study uses a normative juridical form and approach and supported by empirical research in the form of interviews, and the type of data used is secondary data by obtaining a literature study. The results of the study show that the Regulation on Investment Changes as contained in the Decision of the Cibinong District Court Number 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. regulated in Article 15 of the Minister of Energy and Mineral Resources 27/2013. Furthermore, after the decision of the Cibinong District Court Number 284/Pdt.G/2019/PN Cbi. there have been three revisions to the regulation on Investment Changes, namely through the Minister of Energy and Mineral Resources 34/2017, the Minister of Energy and Mineral Resources 11/2018, and the Minister of Energy and Mineral Resources 7/2020. In the amendment of these provisions, in connection with the transfer of shares, it must still require the approval of the Minister of Energy and Mineral Resources before being submitted to the Menkumham. However, related to changes in directors/commissioners, it is sufficient to notify the Minister of Energy and Mineral Resources no later than 14 (fourteen) working days after obtaining approval from the Ministry of Law and Human Rights. Then, in the implementation of the regulation on Investment Changes, there is no synchronization between the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of AHU) and the Ministry of Energy and Mineral Resources. This can be seen from Permenkumham 21/2021 which does not include the approval of the Minister of Energy and Mineral Resources before being submitted to the Ministry of Law and Human Rights, if the company in the mineral and coal mining business sector transfers shares. This resulted in the ratification of the transfer of the company's shares in the mining business sector, without first obtaining the approval of the Minister of Energy and Mineral Resources.

Keywords: Mineral and Coal Mining, Changes in Investment, Transfer of Shares and Changes in the Directors and/or Commissioner